

Konsep Dasar Management/Pengelolaan Pendidikan



Tujuan:

Untuk memenuhi tugas matakuliah

Perencanaan Pembelajaran SD

Drs. Dedi Supriadi, MM.

Di susun oleh:

➤ Titi Nur Sativa

168610052

STKIP Arrahmaniyah Depok

Program Study Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 4

2018

A. Konsep dasar Pengelolaan Pendidikan

Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi (Oteng Sutisna :1985). Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Moh. Rifai (1982) menjelaskan pengertian administrasi sebagai berikut: Administrasi ialah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien.

Sementara itu Sondang P. Siagian (1983) mendefinisikan pengertian administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. pengertian administrasi mengandung makna adanya (1) tujuan yang mesti dapat direalisasikan guna kepentingan lembaga, individu atau pun kelompok, (2) keterlibatan personil, material dan juga finansial dalam posisinya yang saling mendukung dan satu sama lain saling memerlukan dan juga saling melengkapi, (3) proses yang terus menerus dan berkesinambungan yang dimulai dari hal yang kecil dan sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit, (4) pengawasan atau kontrol guna keteraturan, keseimbangan dan keselarasan, (5) tepat guna dan berhasil guna supaya tidak terjadi penghambur-hamburan waktu, tenaga, biaya dan juga fasilitas agar dapat mencapai keberhasilan dan produktivitas yang cukup memadai, (6) hubungan manusiawi yang menempatkan manusia sebagai unsur utama dan terhormat serta memiliki kepentingan di dalamnya.

Dengan demikian, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Untuk mengkaji lebih dalam tentang manajemen khususnya manajemen pendidikan, perlu dikaji pandangan tentang manajemen khususnya manajemen pendidikan. Adapun beberapa pandangan tentang manajemen pendidikan yaitu:

1. Manajemen sebagai suatu system

Manajemen dipandang sebagai suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

2. Manajemen sebagai suatu proses

Manajemen sebagai rangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manajemen sebagai suatu proses dapat dipelajari dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh manajer.

3. Manajemen sebagai proses pemecahan masalah.

Proses manajemen dalam prakteknya dapat dikaji dari proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh semua bagian/komponen yang ada dalam organisasi. Secara konkrit dalam organisasi pelayanan pendidikan, seperti yang dilakukan di Dinas Pendidikan yaitu, identifikasi suatu masalah, perumusan masalah dan dilanjutkan dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Melalui tahapan tersebut diharapkan tercapai hasil kegiatan secara efektif dan efisien.

Dudung A. Dasuqi dan Setyo Somantri (1994) menyampaikan beberapa alasan tentang perlunya kaidah-kaidah administrasi diterapkan dalam bidang pendidikan. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan dan juga tuntutan pembangunan yang terjadi pada tingkat lokal, regional atau pun global sehingga pendidikan dapat merencanakan, menyediakan, mengelola dan juga mengatur berbagai tuntutan yang ada guna kepentingan pembangunan itu sendiri atau guna kelanjutan dari pembangunan yang berkesinambungan.
- b. Produk atau hasil dari pembangunan pendidikan yang berbentuk fisik atau pun non-fisik yang berupa ilmu atau pengetahuan dalam ruang lingkup lokal, regional dan global. Agar produk atau hasil dari pembangunan pendidikan ini dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang tentunya memerlukan penataan dan penggunaan yang memadai sesuai dengan kaidah-kaidah administrasi yang telah

teruji keberhasilannya.

- c. Peranan dan tugas dari lembaga pendidikan (persekolahan) makin lama semakin bertambah dan semakin beragam sehingga lembaga pendidikan atau persekolahan ini tidak hanya memerlukan tenaga guru sebagai pengajar saja akan tetapi juga memerlukan berbagai macam tenaga kependidikan lain seperti pengelola pendidikan, administrator, manajer, planner, supervisor dan juga *counsellor* dalam proses belajar mengajar.
- d. Tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi dan juga tuntutan dari hidup manusia itu sendiri yang keduanya mesti seimbang dan selaras yang berakibat harus seimbang dan selarasnya lembaga pendidikan sebagai produsen dan individu sebagai konsumennya.
- e. Tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan atau persekolahan yang menuntut peralatan dan fasilitas yang memadai serta personil yang berkualitas sebagai jaminan lembaga pendidikan atau persekolahan dalam merebut kepercayaan konsumen tenaga kerja di bursa tenaga kerja. Perencanaan, pengelolaan dan kualitas mutu keluaran dari lembaga pendidikan atau persekolahan tidak sepenuhnya dapat dipercayakan hanya kepada guru saja walaupun guru tersebut memiliki kualitas yang cukup tinggi.
- f. Pendidikan dan lembaga pendidikan dewasa ini telah menjadi ajang bisnis yang memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat merebut persaingan yang sehat.

B. Perbedaan Administrasi dengan Manajemen

Dalam pelaksanaannya, administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan dan harus merupakan suatu kesatuan, hanya saja kegiatannya yang dapat dibedakan. Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *administrare* yang berarti membantu atau melayani. Secara definitif, administrasi dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan pencatatan secara tertulis dan penyusunan secara sistematis dari keterangan-

keterangan yang ada dengan tujuan agar mudah memperoleh ikhtisarnya secara menyeluruh. Dengan kata lain, dalam arti sempit, administrasi itu tidak lebih daripada sekedar rangkaian aktivitas menghimpun, mencatut, mengolah menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap kerja sama.

Namun dalam arti luas administrasi menurut Sigian adalah administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut The Liang Gie administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam setiap usaha kerja sama setiap kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. The Liang Gie menyebutkan ada 8 unsur administrasi, yaitu pengorganisasian, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha dan hubungan masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut dapat pula disebut penataan. Oleh karena itu, rangkaian penataan itu dapat dimaksudkan sebagai administrasi. Agar kegiatan penataan itu berlangsung sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka perlu adanya kegiatan lain yang dapat mengarahkan, mengatur, menggerakkan dan mengendalikan setiap tindakan penataan ke arah yang diinginkan, dan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah melalui kegiatan manajemen.

Administrasi lebih luas daripada manajemen, namun manajemen sekaligus merupakan inti dari kegiatan administrasi yang bertugas melaksanakan semua kegiatan yang ditentukan pada tingkat administrasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa manajemen sebenarnya termasuk ke dalam salah satu kegiatan administrasi, dan sekaligus merupakan alat pelaksana dari administrasi. Administrasi bersifat menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh organisasi, sedangkan manajemen merupakan pelaksanaannya pada tingkat sektoral atau departemental.

C. Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan

Ruang lingkup manajemen biasa disebut dengan istilah: batasan, wilayah

pembahasan atau objek manajemen. Adapun ruang lingkup atau obyek dari manajemen pendidikan itu membahas tentang:

1. Tata laksana sekolah

Hal ini meliputi:

- a. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha.
- b. Otorisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah.
- c. Masalah kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah.
- d. Masalah perlengkapan dan perbekalan.
- e. Keuangan dan pembukuannya.
- f. Korespondensi atau surat-menyurat.
- g. Laporan-laporan (bulanan, kuartalan, dan tahunan).
- h. Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan dan pemberhentian pegawai.
- i. Pengisian buku pokok, klapper, rapor, dan sebagainya.

2. Personel guru dan pegawai sekolah

Hal ini meliputi antara lain:

- a. Pengangkatan dan penempatan tenaga guru.
- b. Organisasi personel guru-guru.
- c. Masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru.
- d. Rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru.
- e. Konduite dan penilaian kemajuan guru-guru.
- f. Inservice training dan up-gradding guru-guru.

3. Siswa

Hal ini meliputi antara lain:

- a. Organisasi dan perkumpulan murid.
- b. Masalah kesehatan dan kesejahteraan murid.
- c. Penilaian dan pengukuran kemajuan murid.
- d. Bimbingan dan penyuluhan bagi murid-murid (guidance and counseling)

4. Supervisi pengajaran

Hal ini meliputi antara lain:

- a. Usaha membangkitkan dan mengembangkan semangat guru-guru dan pegawai-pegawai tatausaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya.
- b. Usaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-mertode baru dalam mengajar dan belajar yang lebih baik.
- c. Mengusahakan dan mengembangkan kerja sama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah.
- d. Mengusahakan cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran.
- e. Usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru (inservice training dan up-gradding)

5. Pelaksanaan pembinaan kurikulum

Pelaksanaan pembinaan kurikulum meliputi:

- a. Mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum didalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran.
- b. Menyusun dan melaksanakan organisaisi kurikulum beserta materi-materi dan sumber-sumber, dan metode-metode pelaksanaanya disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekolah.
- c. Kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang harus diturut begitu saja dengan

mutlak tanpa perubahan dan penyimpangan sedikitpun. Kurikulum lebih merupakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam menggunakan kurikulum guru atau pendidik, disamping menuruti dan mengikuti apa yang tercantum didalamnya, berhak dan berkewajiban pula memilih dan menambah materi-materi, sumber-sumber ataupun metode-metode pelaksanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan lingkungan masyarakat lingkungan sekolah, dan membuang serta mengurangi apa yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan Negara pada umumnya. Itulah sebabnya mengapa kurikulum perlu mendapat perhatian, dan pembinaan kurikulum harus diusahakan dan dijalankan.

6. Pendirian dan perencanaan bangunan sekolah

Pendirian dan perencanaan bangunan sekolah ini meliputi:

- a. Cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan.
- b. Mengusahakan, merencanakan, menggunakan biaya pendirian gedung sekolah.
- c. Menentukan jumlah dan luas ruangan-ruangan kelas, kantor, gudang, asrama, lapangan olah raga, podium, kebun sekolah, dan sebagainya.
- d. Cara-cara penggunaan gedung sekolah dan fasilitas-fasilitas lain yang efektif dan produktif, serta pemeliharannya secara kontinyu.
- e. Alat-alat perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran yang dibutuhkan.

7. Hubungan sekolah dengan masyarakat

Hal ini mencakup hubungan sekolah dengan sekolah-sekolah lain, hubungan sekolah dengan pemerintah setempat, hubungan sekolah dengan instansi-instansi dan jabatan-jabatan lain, dan hubungan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan kerja sama yang bersifat pedagogis, sosiologis dan produktif, yang dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan bagi kedua belah pihak.

D. Fungsi Pengelolaan Pendidikan

1. Perencanaan

Satu-satunya hal yang pasti di masa depan dari organisasi apapun termasuk lembaga pendidikan adalah perubahan, dan perencanaan penting untuk menjembatani masa kini dan masa depan yang meningkatkan kemungkinan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mondy dan Premeaux (1995) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil, terutama karena aktivitas pengorganisasian, pemotivasian, penunjukkan staff, dan pengendalian tergantung pada perencanaan yang baik (Fred R. David, 2004).

Dalam dinamika masyarakat, organisasi beradaptasi kepada tuntutan perubahan melalui perencanaan. Menurut Johnson (1973) bahwa: *"The planning process can be considered as the vehicle for accomplishment of system change"*. Tanpa perencanaan sistem tersebut tak dapat berubah dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan lingkungan yang berbeda. Dalam sistem terbuka, perubahan dalam sistem terjadi apabila kekuatan lingkungan menghendaki atau menuntut bahwa suatu keseimbangan baru perlu diciptakan dalam organisasi tergantung pada rasionalitas pembuat keputusan. Bagi sistem sosial, satu-satunya wahana untuk perubahan inovasi dan kesanggupan menyesuaikan diri ialah pengambilan keputusan manusia dan proses perencanaan.

Dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun kegiatan lembaga pendidikan, diperlukan data yang banyak dan valid, pertimbangan dan pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang direncanakan. Oleh karena itu kegiatan perencanaan sebaiknya melibatkan setiap unsur lembaga pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Rusyan (1992) ada beberapa hal yang penting dilaksanakan terus menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan, diantaranya:

- Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai/personil lembaga

pendidikan.

- Menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan.
- Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokan tugas terhadap masing-masing personil.
- Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur dan petunjuk pelaksanaan lainnya.
- Mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana/sekala pengkajian.
- Memilih para staf (pelaksana), administrator dan melakukan pengawasan.
- Merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil kerja (kinerja), pola pengisian staf dan formulir laporan pengajuan.
- Menentukan keperluan tenaga kerja, biaya (uang) material dan tempat.
- Menyiapkan anggaran dan mengamankan dana.
- Menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan.

2. Pengorganisasian

Tujuan pengorganisasian adalah mencapai usaha terkoordinasi dengan menerapkan tugas dan hubungan wewenang. Malayu S.P. Hasbuan (1995) mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian fungsi manajemen dapat dilihat terdiri dari tiga aktivitas berurutan: membagi-bagi tugas menjadi pekerjaan yang lebih sempit (spesialisasi pekerjaan), menggabungkan pekerjaan untuk membentuk departemen (departementalisasi), dan mendelegasikan wewenang (Fred R. David, 2004).

Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian merupakan salah satu aktivitas manajerial yang juga menentukan berlangsungnya kegiatan kependidikan sebagaimana

yang diharapkan. Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi memiliki berbagai unsur yang terpadu dalam suatu sistem yang harus terorganisir secara rapih dan tepat, baik tujuan, personil, manajemen, teknologi, siswa/member, kurikulum, uang, metode, fasilitas, dan faktor luar seperti masyarakat dan lingkungan sosial budaya.

Sutisna (1985) mengemukakan bahwa organisasi yang baik senantiasa mempunyai dan menggunakan tujuan, kewenangan, dan pengetahuan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dalam organisasi yang baik semua bagiannya bekerja dalam keselarasan seakan-akan menjadi sebagian dari keseluruhan yang tak terpisahkan. Semua itu baru dapat dicapai oleh organisasi pendidikan, manakala dilakukan upaya: 1) Menyusun struktur kelembagaan, 2) Mengembangkan prosedur yang berlaku, 3) Menentukan persyaratan bagi instruktur dan karyawan yang diterima, 4) Membagi sumber daya instruktur dan karyawan yang ada dalam pekerjaan.

3. Pengarahan

Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

4. Pengawasan

Sebagaimana yang dikutip Muhammad Ismail Yusanto (2003), Mockler (1994) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu; menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan.

Dalam konteks pendidikan, Depdiknas (1999) mengistilahkan pengawasan sebagai

pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau supervisi yang harus diterapkan sebagai berikut:

- a. Pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan memfokuskan pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi para instruktur atau staf dan tidak semata-mata mencari kesalahan.
- b. Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. Para staf diberikan dorongan untuk memperbaiki dirinya sendiri, sedangkan pimpinan hanya membantu.
- c. Pengawasan dalam bentuk saran yang efektif
- d. Pengawasan yang dilakukan secara periodik.

5. Pengembangan

Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada tahapan yang lebih kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut maka, pengembangan dalam pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya memajukan program pendidikan ini ketingkat program yang lebih sempurna, lebih luas, dan lebih kompleks.

E. Pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan Pendidikan

1. Pendekatan Organisasi Klasik

Pendekatan organisasi klasik ini sering disebut juga dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor seorang yang memiliki latar belakang dan

pengalaman sebagai buruh, juru ketik, mekanik, dan akhirnya berpengalaman sebagai kepala teknik yang hidup antara tahun 1856 sampai dengan tahun 1915. Gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri. Konsep dari gerakan ini adalah orang dapat juga bekerja layaknya sebagai mesin.

2. Pendekatan Hubungan Manusia

Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett (1868-1933) orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor-faktor manusia dalam administrasi. Mary Follet juga banyak menulis yang berkenaan dengan sisi manusia dalam administrasi. Mary Follet percaya bahwa masalah yang mendasar dalam semua organisasi adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis dan harmonis. Walaupun terjadi konflik, menurut pemikiran Mary Follet, konflik tersebut merupakan suatu proses yang normal bagi pengembangan hal yang mengakibatkan terjadinya konflik.

3. Pendekatan Prilaku

Pendekatan prilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan proposisi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik dan ekonomi. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester I. Barnard yang hidup antara tahun 1886 sampai dengan tahun 1961. Bukunya "Functions of the Executive" (1938). Dalam buku ini Barnard mengulas secara lengkap teori perilaku yang kooperatif dalam organisasi formal. Barnard menyimpulkan bahwa kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. Konsep-konsep struktur yang dianggap penting adalah individu, sistem kerja sama, organisasi formal, organisasi formal yang kompleks, dan juga organisasi informal. Konsep-konsep dinamis yang penting, menurut Barnard, adalah kerelaan, kerjasama, komunikasi, otoritas, proses keputusan, dan keseimbangan dinamik.

Permasalahan dan Pengembangan Pengelolaan Pendidikan “Masalah Kontemporer Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional” dapat diikhtisarkan bahwa permasalahan dan

pengembangan pengelolaan pendidikan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a. Sistem Desentralisasi dalam Pengelolaan Pendidikan

Bagaimanakah kita dapat mengoperasikan sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan nasional yang efektif dan efisien bagi semua daerah? Sebab daerah-daerah tidak semuanya siap untuk dapat menerapkan sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan kita ini. Apakah dengan menerapkan sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan dapat merusak tatanan kesatuan dan persatuan yang telah terjalin selama ini antar berbagai daerah di negara kita? Akan tetapi penerapan sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan adalah salah satu upaya untuk memberikan kepercayaan kepada daerah dalam mengelola sistem pendidikan yang berada di daerah tersebut dalam rangka untuk pengembangan sumber daya manusia yang bervariasi untuk kepentingan pembangunan pendidikan dan juga pembangunan nasional secara menyeluruh.

b. Penerapan Otonomi dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang mempercayakan sepenuhnya kepada perguruan tinggi untuk dapat mengelola dan mengembangkannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi perguruan tinggi tersebut dan daerah masing-masing di mana perguruan tinggi itu berada. Setiap perguruan tinggi akan diberikan kepercayaan dan kewenangan yang luas untuk dapat mengelola proses pendidikan dengan segala aspek yang ada di dalamnya.

c. Profesionalisasi Jabatan Tenaga Kependidikan

Supaya tingkat efektivitas dan efisiensi hasil pendidikan nasional dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dalam mengejar berbagai ketinggalan bangsa Indonesia dengan bangsa lain sehingga pada akhirnya bangsa Indonesia dapat bersaing secara sehat dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

d. Kendali Mutu Pendidikan Nasional

Mutu proses pengajaran sangat dipengaruhi oleh perilaku guru dalam hal (1) menyusun desain instruksional, (2) menguasai berbagai macam metode mengajar dan

mampu menerapkan metode tersebut dengan kegiatan siswa di dalam kelas, (3) berinteraksi dengan siswa untuk menumbuhkan dan membangkitkan motivasi belajar yang menyenangkan, (4) menguasai bahan dan menggunakan berbagai macam sumber belajar untuk membangkitkan kegiatan belajar aktif, (5) mengenal perbedaan individual setiap siswa, dan (6) memilih proses dan hasil belajar, memberikan umpan balik, dan juga mampu dalam merancang program belajar remedial (Djam'an Satori dan Udin S. Saud 1994).